

BAB I

PENDAHULUAN

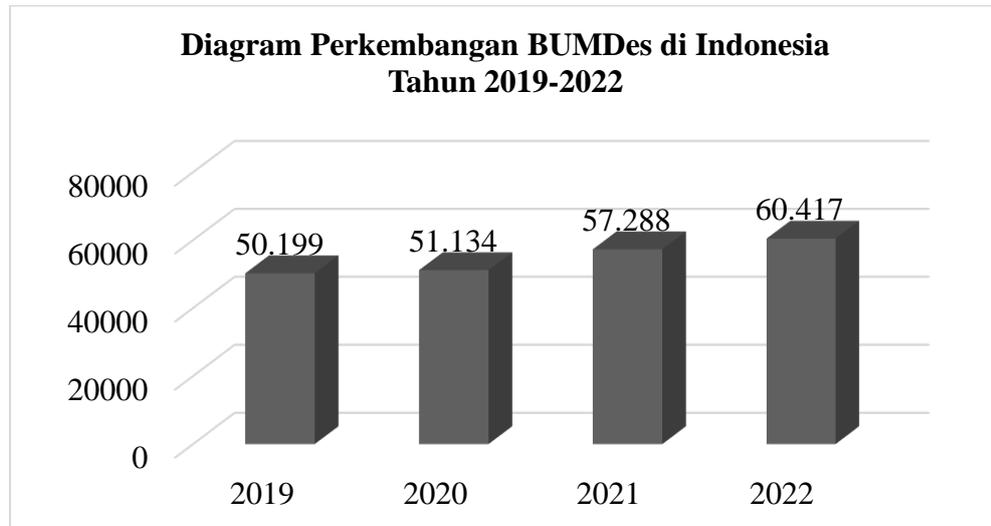
1.1 Latar Belakang

Desa memiliki peran yang cukup penting dalam pencapaian tujuan nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim dipedesaan. Berawal dari desa yang produktif sehingga mampu mengembangkan perekonomian dan potensi desa, maka untuk mewujudkan perekonomian yang stabil di Indonesia, pemerintah telah melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan desa, namun dalam implementasinya masih ditemui kegagalan dalam merealisasikannya (Pakaya, 2016).

Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah desa untuk mengelola dan mengatur daerah kewenangannya merupakan salah satu hal yang dapat mendorong pembangunan nasional dan kesejahteraan desa, serta menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif dalam pengembangan desa melalui lembaga-lembaga desa (Christia dan Ispriyarso, 2019). Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, pemerintah membentuk suatu badan keuangan yaitu BUMDes. Maksud dari BUMDes adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh desa dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, serta di kelola oleh desa kemudian hasil dari usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Cara kerja BUMDes yaitu dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam wadah badan usaha, dilakukan dengan profesional dan tanggung jawab, serta tetap mengedepankan potensi desa (Zulkarnaen, 2016).

Berikut data diagram terkait perkembangan BUMDes di Indonesia pada tahun 2019-2022. Dapat dilihat pada gambar 1.1:

Gambar 1. 1 Diagram perkembangan BUMDes di Indonesia



Berdasarkan Diagram Diatas, dapat dilihat bahwa jumlah BUMDes di Indonesia dari 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Kompas.id). Dengan bertambahnya jumlah BUMDes di Indonesia dari tiap tahun akan sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi peningkatan-peningkatan tersebut juga harus didukung terhadap kualitas BUMDes yang ada, kualitas ini dapat dinilai dari adanya laporan keuangan BUMDes itu sendiri. Modal usaha BUMDes berasal dari dana desa, oleh sebab itu BUMDes harus bisa mempertanggungjawabkannya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat agar para pelaku BUMDes dapat mengukur kinerja usahanya.

BUMDes merupakan suatu lembaga berlandaskan hukum, seperti dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 menjelaskan pertanggungjawaban BUMDes melalui laporan keuangan berkala yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Menurut Munawir (2014) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkementingan dengan data keuangan. Sementara menurut Kasmir (2019) laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau waktu tertentu. Jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan

suatu entitas pada suatu periode akuntansi, laporan keuangan dapat digunakan sebagai gambaran kinerja dan sebagai pengambilan keputusan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tahun 2023 melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 362 BUMDes ditanah air, agar kinerja BUMDes dapat meningkat dan mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Taufik Maulana HS, salah satu anggota tim sosialisasi pengelolaan BUMDes dari BPKP Jawa Tengah menyampaikan hasil pengamatan, yaitu telah ditemukan enam penyebab pengelolaan BUMDes tidak efektif. Salah satunya yaitu kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan (Jatengprov.go.id)

Para BUMDes bisa melakukan penyesuaian serta bertransformasi dengan segala perubahan yang sudah ada dalam standar yang berlaku agar mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Namun hal ini terkadang tidak selaras dengan kenyataannya, umumnya BUMDes menghadapi berbagai tantangan serta masalah tata pengelola keuangan. Pertama, bendahara yang berlatar belakang pendidikan bukan lulusan akuntansi, karena berpengaruh pada pencatatan dan pelaporan yang berbasis akuntansi. Kedua, arsip dokumen yang belum rapih, karena penataan bukti-bukti transaksi membantu dalam pencatatan keuangan. Ketiga, penyusunan laporan keuangan masih berbasis kas (*cash basis*). Pencatatan hanya dilakukan saat ada uang/kas. Padahal standarnya adalah berbasis aktual, per kejadian walaupun tidak ada uang tunai (News.detik.com)

Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022 menyatakan bahwa laporan keuangan bumdes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan atau dengan kata lain entitas ini tidak mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pasar modal dan perbankan, seperti perusahaan yang tidak terdaftar dibursa efek. Dan untuk laporan keuangannya hanya disiapkan untuk kepentingan internal, seperti pemilik, manajemen, atau kreditor tertentu,

bukan untuk masyarakat umum. SAK ETAP merupakan SAK yang lebih sederhana dibandingkan SAK Umum yang lebih rumit, dan SAK ETAP ditunjukkan untuk entitas beskala kecil dan menengah. Sehingga SAK ETAP ini bisa sebagai standar akuntansi keuangan yang bisa diterapkan oleh BUMDes (Kompas.id)

Desa Kalikajar adalah sebuah desa di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Desa Kalikajar memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Kalika Mandiri, yang sudah berjalan dari tahun 2017 dan masih berjalan sampai sekarang, untuk unit usaha yang didirikan berupa Kalika Mandiri *Mart* (KM *Mart*) yang melayani penjualan sembako dan kebutuhan sehari-hari dengan harga grosir dan ecer, melayani jasa pembayaran online, dan juga melayani penyewaan tenda dan alat konstruksi bangunan ringan. Pada akhir tahun 2017 BUMDes Kalika Mandiri mengalami kerugian dan menurunnya omset penjualan, namun pada awal tahun 2020 para aktor penggerak BUMDes mengevaluasi secara penuh sehingga mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Beberapa penelitian telah dilakukan, namun hasilnya belum konsisten atau masih terdapat kendala. Seperti penelitian yang dilakukan Joko Samudra (2020), menyatakan bahwa laporan keuangan pada BUMDes Muara Uwai masih belum sesuai dengan prinsip akuntansi. Sementara itu penelitian yang dilakukan Muyesaroh (2021) BUMDes Amanah sudah menyajikan laporan keuangan sebagai penanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, tetapi masih belum ada laporan arus kas. Dan pada penelitian Yustika (2020), BUMDes Agro Nenas menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual, walaupun pada laporan keuangan belum menyajikan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK. Dari Penelitian – penelitian terdahulu disimpulkan bahwa sebagian besar BUMDes masih belum bisa menerapkan pembuatan laporan keuangan yang benar, dari segi sumber daya manusia yang belum mumpuni atau belum paham cara penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan BUMDes di Desa Kalikajar. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini dengan judul **“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalika Mandiri Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan BUMDes Kalika Mandiri?.
2. Bagaimana dampak laporan keuangan terhadap perkembangan BUMDes?.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan BUMDes Kalika Mandiri sudah sesuai dengan SAK ETAP.
2. Untuk mengidentifikasi dampak laporan keuangan terhadap perkembangan BUMDes

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat, antara lain :

1. Bagi BUMDes

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan khususnya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan informasi keuangan guna menunjang kelangsungan hidup BUMDes.

2. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan khasanah perpustakaan, bahan referensi, dan bahan masukan bagi peneliti lain, yang berhubungan dengan masalah yang ada.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya laporan keuangan bagi pengembangan BUMDes.

